

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA NO. 11/PERMEN-KP/2016 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAJ PERIZINAN KAPAL

PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG TERHADAP

NELAYAN DI PELABUHAN PENJAJAP



Diajukan oleh:

Innes Tandora

NPM : 150512190

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum kenegaraan dan
Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NO. 11/PERMEN-KP/2016 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL
PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG TERHADAP
NELAYAN DI PELABUHAN PENJAJAP KALIMANTAN BARAT**



Diajukan oleh:

Innes Tandora

NPM : 150512190
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk Ujian Pendarasan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing



Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NO. 11/PERMEN-KP/2016 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL
PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG TERHADAP
NELAYAN DI PELABUHAN PENJAJAP KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 September 2019
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra. R., SH.M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

19/9/19



**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Yuli Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini, saya dedikasikan kepada Tuhan yang Maha Esa, Papa (Lim Sui An), Mama (Tjhai Fui Cu) dan Cece saya (dr. Jesisca) yang selalu mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3:5”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2019

Yang menyatakan,

Innes Tandora

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang terhadap Nelayan di Pelabuhan Penjajap Kalimantan Barat”. Selama menyusun skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian hukum atau skripsi ini.
2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, arahan, pengajaran dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
4. Kedua orang tua (Tan Sui An dan Tjhai Fui Cu) serta cece saya (dr. Jesisca) yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus kepada penulis serta selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil selama penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Maycarl Bernandinus Hasibuan, yang selalu memberikan dukungan, hiburan, mendampingi, selalu ada dalam situasi apapun, dan memberi cinta yang tulus kepada penulis.

6. Karsela Giovanni dan Junny Andrea, sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa dimanapun dan kapanpun kepada penulis.
7. Teman-teman Support System: Meilany Ompusungu, Maria Brigita, Herlina Margareta, Gracia Elrica, Mega, dan Alberta Indriani atas kebersamaan, pengertian, doa, dan dukungan yang telah diberikan.
8. Teman-teman kost MUU : Marcelina Nadia, Imelda Nainggolan, Nathania Tarigan, dan Angel atas kebersamaan, pengertian, doa, dan dukungan yang telah diberikan.
9. Seluruh teman-teman FH UAJY 2015 atas kebersamaan, saling mendukung dan mendoakan selama kuliah.
10. Seluruh Dosen dan Pegawai di FH UAJY Yogyakarta, atas segala ilmu dan dukungan selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan karya tulis ilmiah.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun dengan tulus mendoakan dan memberi dukungan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini sehingga penulis sangat menghargai kritik dan saran untuk membangun karya tulis ilmiah lain yang lebih baik. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Agustus 2019

Innes Tandora

ABSTRACT

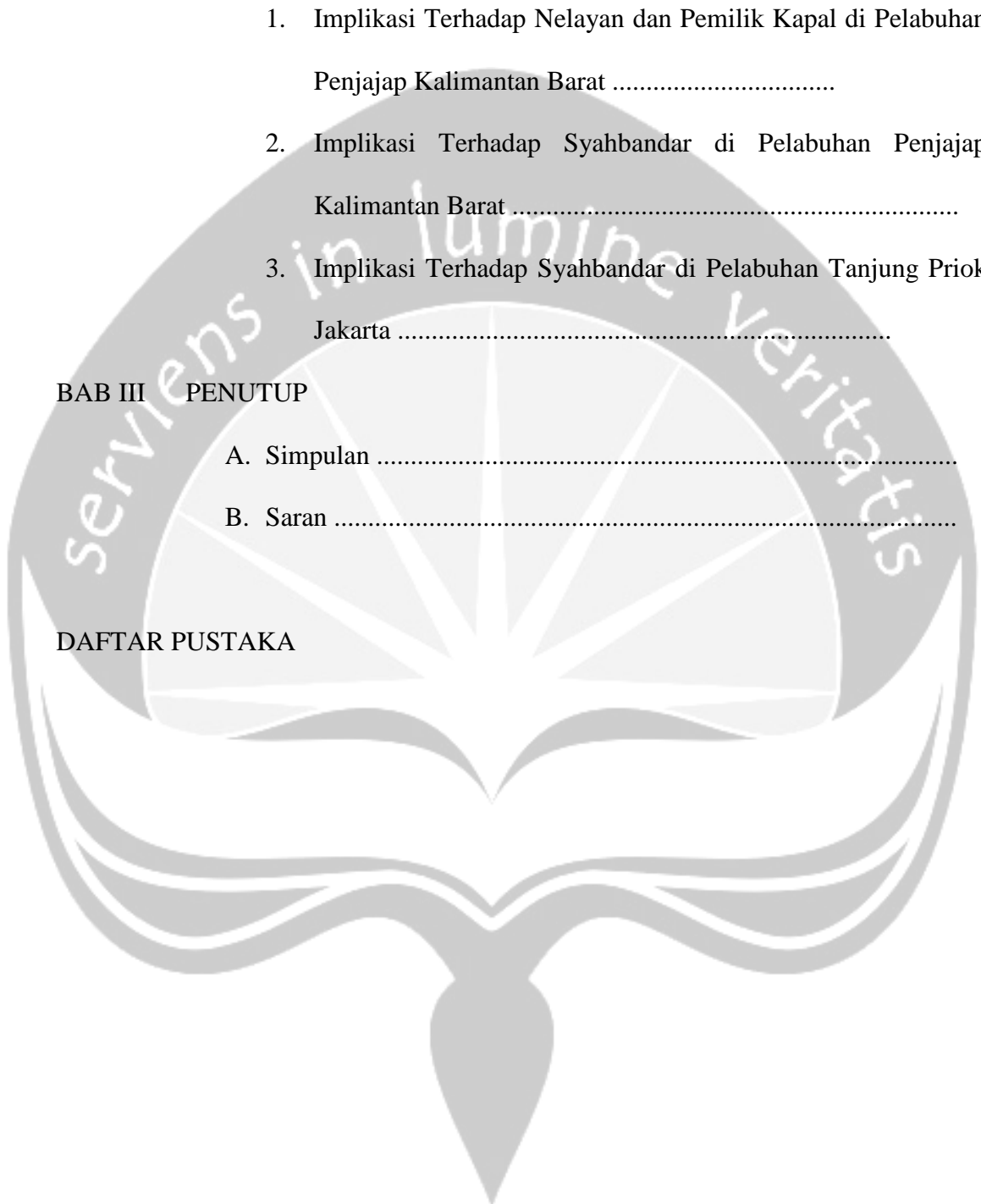
Indonesia is a maritime country, in which 29% of its population working as fishermen. As a state of law, every actions taken by fishermen must be based on the laws including the permit of the ship. The aim of this study was to identify the problems in overcoming ship permit, so that the results of this study can contribute to improving regulations and the welfare of fishermen. Related to ship permit for fishermen, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 11 of 2016 about minimum service standards for fishing vessel licensing outlets for re-measurement results has been issued. The problem identified in this study was the implications of the issuance of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 11 of 2016 on fishermen in the area of West Kalimantan especially in the Penjjap Port. Method used for the research was a normative legal research. The result of this research was that the management of ship permits under 30 GT was made easier since the Ministerial Regulation Number 11 of 2016 implemented because fishermen does not need a recommendation letter in the form of Norms, Standards, Procedures and Criteria from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Jakarta. Meanwhile for fishermen or boat owners with ship capacity over 30 GT, they need to apply for their ships' permits at the head office of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Jakarta by fulfilling all the requirements that have been set. It is expected that the management of ship permits under 30 GT is easier and does not have significant problems compared to the management of ship permits over 30 GT.

Keywords: Implication, Fishery, Ship Permit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Mengenai Perizinan Kapal	18

1. Pengertian Perizinan	18
2. Sifat Izin	19
3. Elemen Pokok Perizinan	22
4. Fungsi Pemberian Izin	32
5. Tujuan Pemberian Izin	32
6. Bentuk dan Urgensi Izin	34
7. Pengertian Kapal Perikanan	38
8. Klasifikasi Kapal Perikanan di Indonesia	42
9. Jenis-Jenis Izin Kapal Perikanan	47
B. Latar Belakang dan Tujuan Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016.....	70
1. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016	70
2. Tujuan Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016	73
3. Dampak yang Diharapkan dari Diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 11/PERMEN-KP/2016	74
C. Implikasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 Terhadap Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Penjajap Kalimantan Barat	75



1. Implikasi Terhadap Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Penjajap Kalimantan Barat	75
2. Implikasi Terhadap Syahbandar di Pelabuhan Penjajap Kalimantan Barat	78
3. Implikasi Terhadap Syahbandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta	79
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85